KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : MRP minta dilibatkan
Tanggal : Minggu, 13 Juni 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

MRP Minta Dilibatkan

Panitia khusus di DPR disebut hanya memperhatikan dua pasal dalam proses pembahasan revisi UU Otsus Papua.

Putra Ananda
ananda@mediaindonesia.com

MAJELIS Rakyat Papua (MRP) menyesalkan DPR tidak melibatkan MRP dalam proses revisi Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Keluhan itu disampaikan Ketua MRP Timoteus Morib saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

"Padahal, Pasal 77 UU 21/2001 tentang Otsus Papua itu jelas mengatakan perubahan atas UU ini dengan melibatkan rakyat Papua yang diwakili oleh MRP dan DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua)," tutur Timoteus.

Ia berharap revisi UU Otsus Papua yang saat ini tengah ditangani panitia khusus (pansus) di DPR dilakukan secara menyeluruh, bukan terbatas pada beberapa pasal tertentu.

"Tidak sepotong-sepotong seperti sekarang ini yang hanya memperhatikan perubahan pada dua pasal," kata Timoteus.

Kedua pasal yang dimaksud berkaitan dengan dana otsus dan pemekaraan Bumi Cenderawasih. Padahal, banyak pasal lain yang perlu dikonstruksi ulang agar benar-benar diterapkan.

Timoteus mencontohkan, selama 21 tahun otsus berlaku, dari 24 kekhususan Papua yang diamanatkan oleh UU Otsus, hanya empat yang dijalankan, yaitu gubernur dan wakil gubernur adalah orang Papua asli, pembentukan MRP, persolan kekerasan, serta pembangunan infrastruktur.

"Kami sudah ke barat dan ke timur untuk menyampaikan keluh-kesah kami, tapi tidak ada hasilnya," paparnya.

MRP pun berupaya menyampaikan aspirasi mereka melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Mahfud lantas meyakinkan MRP bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Otsus Papua dilaksanakan sesuai konstitusi.

"Semua sesuai dalam koridor konstitusi dan dengan pendekatan kesejahteraan," ungkap Mahfud dalam keterangan tertulis, kemarin.

Mahfud menegaskan, Presiden pun telah memberikan arahan agar penyelesaian persoalan di Papua mengedepankan dialog demi kesejahteraan. Upaya penegakan hukum difokuskan terhadap kelompok kriminal bersenjata. Jangan sampai keberadaan mereka mengganggu dialog antara pemerintah dan masyarakat di Tanah Papua.

> "DPR RI membuka ruang melalui Pansus Otsus Papua untuk lakukan negoisasi kembali dengan pemerintah pada saat masa rapat dengar pendapat umum (RDPU) guna mendengar aspirasi masyarakat Papua."
>
> **Yan Permenas Mandenas**
> Wakil Ketua Pansus Papua

Dalam merespons keluhan MRP, Pansus RUU Otsus Papua membuka opsi merevisi UU Otsus secara menyeluruh. Wakil Ketua Pansus Papua Yan Permenas Mandenas sependapat bahwa persoalan Papua sangat kompleks sehingga penyelesaiannya tidak bisa hanya dilakukan dengan merevisi pasal soal anggaran dan pemekaran.

"DPR RI membuka ruang melalui Pansus Otsus Papua untuk lakukan negoisasi kembali dengan pemerintah pada saat masa rapat dengar pendapat umum (RDPU) guna mendengar aspirasi masyarakat Papua," ungkap Yan saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

Tangkap buron

Satgas Nemangkawi menangkap anggota kelompok kriminal teroris bersenjata (KKTB) Tembagapura, Mairon Tabuni alias Miron. Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi Kombes M Iqbal Al-Qudusy mengatakan Miron ditangkap di Mimika, Papua, Kamis (10/6).

"Benar, kami telah berhasil menangkap terduga KKB Miron Tabuni di Mimika," kata Iqbal, Sabtu (12/6).

Iqbal menyebut Mairon masuk daftar pencarian orang (DPO) setelah terlibat sejumlah aksi kriminal di Kabupaten Mimika. Mairon tergabung dalam KKB Tembagapura di bawah komando Guspi Waker pada 2017.

Sepanjang 12 Mei hingga kemarin, satgas mengklaim telah melumpuhkan 15 teroris KKTB. Empat di antaranya tewas. (Medcom/Faj/Pra/P-2)

PERPUSTAKAAN DPR RI